

PENGUATAN KAPASITAS PERAN SOSIAL BUMDES DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK EKONOMI COVID-19

Slamet Rosyadi^{1*}, Paulus Israwan Setyoko¹, Denok Kurniasih¹, Wita Ramadhanti², Ayusia Sabhita Kusuma³, Zaula Rizqi Atika⁴

¹Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

²Akuntansi, Universitas Jenderal Soedirman

³Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

⁴Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Article history

Received : 14-09-2020

Revised : 15-12-2020

Accepted : 04-01-2021

*Corresponding author

Slamet Rosyadi

Email: slamet.rosyadi@unsoed.ac.id, slametrosyadi72@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa memiliki peran sosial penting dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Metode yang digunakan adalah sosialisasi peran sosial BUMDes dan pendampingan. Implementasi kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang peran sosial BUMDes dan manajemen distribusi paket sembako, masker, dan sabun. Evaluasi sebelum dan setelah kegiatan menunjukkan pengurus BUMDes mengalami peningkatan kapasitas peran sosial dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari sisi kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial.

Kata Kunci: BUMDes; COVID-19; Kapasitas; Peran Sosial

Abstract

Village-owned enterprises (BUMDes), as one of the socio-economic institutions closest to rural communities, have an important social role in handling the impact of the COVID-19 pandemic. The purpose of this research-based community service activity is to strengthen the capacity of BUMDes' social role in overcoming the economic impact of COVID-19. The method used is the socialization of BUMDes' social role and mentoring. The implementation of this activity includes socialization about the social role of BUMDes and management of the distribution of basic food packages, masks, and soap. Evaluation of before and after activities shows that BUMDes administrators have increased the capacity for social roles in handling the economic impact of COVID-19. Another result is the utilization of the village's potential for the procurement of food packages. In this way, BUMDes can run social businesses that impact the welfare of the community. This social role needs to be optimized so that BUMDes are not only seen from the side of their failure to carry out the commercial economic functions.

Keywords: BUMDes; COVID-19; Capacity; Social Role

© 2021 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan munculnya Coronavirus-19 (COVID-19). Sebagaimana disampaikan dalam Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tahun 2020 bahwa COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO. Coronavirus sendiri merupakan zoonosis atau virus yang ditularkan hewan kepada manusia. Virus ini diidentifikasi berasal dari Wuhan, Cina sejak akhir tahun 2019 ([Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020b](#)). Data terakhir secara global sejak tanggal 15 Mei 2020, COVID-19 telah tersebar di 216 negara

dengan jumlah yang terkonfirmasi sebanyak 4.258.666 orang dan korban yang meninggal 294.190 orang. Adapun data terbaru per 15 Mei 2020 di Indonesia, terdapat 16.006 orang yang positif, kemudian 3.518 orang yang sembuh dan 1.043 orang meninggal ([Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020a](#))

Dampak negatif dari pandemi COVID-19 tentunya merugikan berbagai sektor. Kontribusi positif dari banyak pihak sangat dibutuhkan pada masa pandemi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi yang paling dekat jangkauannya dengan masyarakat desa dapat mengambil peran di tengah penanga-

nan pandemi COVID-19. Faktanya, justru banyak ditemukan BUMDes yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Thomas (2019) menyatakan bahwa Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 330 triliun untuk program Dana Desa dalam lima tahun terakhir, namun uang sebanyak itu belum dimanfaatkan secara optimal, terutama oleh BUMDes. Tercatat sebanyak 2.188 BUMDes tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes belum optimal berkontribusi mengembangkan ekonomi desa (Thomas, 2019). Dengan demikian, BUMDes tidak banyak berperan dalam menggali potensi sosial ekonomi desa.

Meskipun otonomi desa sudah berjalan selama lima tahun, keberadaan BUMDes belum menunjukkan peran yang optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Atuna & Harun, 2019; Ibrahim dkk., 2019; Ramadana dkk., 2013). Fungsi ekonomi yang melekat pada BUMDes belum memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi sosial ekonomi desa. Kapasitas pengelola BUMDes tidak semuanya memadai. Demikian pula tidak semua kepala desa memberikan totalitas dukungan kepada BUMDes. Akibatnya, BUMDes mengalami stagnasi dalam menjalankan fungsi ekonominya.

Tujuan awal dari implementasi kebijakan dana desa sebenarnya tidak saja ditujukan untuk mendorong proses pembangunan desa di level akar rumput secara partisipatif, tetapi juga mengembangkan kelembagaan badan usaha di level desa. Harapannya, dengan adanya BUMDes potensi sosial ekonomi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa memungkinkan pemerintah desa untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMDes untuk pengembangan fungsi sosial dan komersilnya.

Sebagai sebuah badan yang dibentuk oleh masyarakat desa, BUMDes tidak hanya dikelola untuk mencari keuntungan (komersial), akan tetapi juga dikelola dengan prinsip kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Artinya, BUMDes harus menjalankan peran dwifungsi, yaitu sebagai lembaga ekonomi komersial dan juga lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes diharapkan dapat menyelenggarakan pelayanan kemasyarakatan dan dapat menunjukkan keberpihakannya terhadap berbagai masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa.

Secara normatif, Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, salah satu pasalnya yaitu pasal 19, mengatur dua fungsi BUMDes. Kedua fungsi tersebut adalah menjalankan peran bisnis sosial (*social business*) dan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) (Sari, 2017).

Dengan demikian, BUMDes memiliki fungsi ganda atau dwifungsi, yaitu fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial.

Belum optimalnya peran sosial BUMDes dialami oleh BUMDes Maju Makmur, Desa Cidora dan BUMDes Besuki Makmur, Desa Besuki Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Kedua BUMDes tersebut membutuhkan penguatan kapasitas peran sosial khususnya dalam membantu pemerintah desa dan *stakeholder* lainnya di masa pandemi COVID-19. Berbagai bantuan sosial di masa pandemi membutuhkan kerjasama antar instansi sehingga bantuan sosial dapat disalurkan kepada anggota masyarakat yang terdampak ekonomi COVID-19 (Rahmansyah dkk., 2020).

Pelayanan publik dalam bentuk pemberian bantuan sosial di masa pandemi berbeda dengan di masa normal. Di masa pandemi, bantuan sosial disalurkan dengan memperhatikan protokol kesehatan agar dapat mencegah penularan penyakit COVID-19. Disamping itu, pemberian bantuan sosial disalurkan kepada anggota masyarakat yang betul-betul merasakan dampak COVID-19, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Situasi ini menjadi pengalaman baru bagi BUMDes Maju Makmur dan BUMDes Besuki Makmur. Para pengurusnya belum memiliki kapasitas yang memadai untuk merespons situasi pandemi yang menuntut peran sosial mereka untuk peduli terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kapasitas pengelola BUMDes dalam mengelola aset dan modal yang didukung dengan dana desa masih lemah. Hambatan struktural lainnya adalah kurangnya dukungan kepada desa dalam memfasilitasi penyertaan modal untuk pengembangan bisnis. Kepala desa khawatir tindakan dalam memberikan penyertaan modal kepada BUMDes akan berdampak hukum terhadap kebijakannya. Akibatnya, BUMDes tidak bisa mengembangkan fungsi bisnisnya untuk menghasilkan profit. Namun demikian, semangat pengelola BUMDes untuk berkontribusi terhadap penanganan masalah masyarakat sangat tinggi terutama di masa pandemi. Oleh karena itu, untuk menguatkan semangat pengelola BUMDes tersebut dibutuhkan penguatan kapasitas peran sosialnya. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menguatkan kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanggulangan dampak ekonomi COVID-19.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan berada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Cidora dan Desa Besuki, Kecamatan Lumbir. Pemilihan lokasi tersebut didasari atas latar belakang BUMDes yang cukup potensial dan responsif terhadap permasalahan

pandemi COVID-19. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan. Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan dengan pengukuran *pre-test* dan *post-test* terhadap materi sosialisasi mengenai peran sosial BUMDes yang diberikan kepada 8 (delapan) pengurus dari 2 (dua) BUMDes secara daring. Tiga indikator untuk mengevaluasi kapasitas peran sosial BUMDes, yaitu: (1) pengetahuan tentang peran sosial, (2) nilai peran sosial, dan (3) upaya menjaga kepercayaan publik. Metode pendampingan digunakan untuk memfasilitasi dan membangun komunikasi tim pengabdian dengan pengurus BUMDes dalam penyuluhan protokol kesehatan dan distribusi bantuan sosial kepada masyarakat desa yang terdampak COVID-19.

Ada 3 indikator penting yang dijadikan ukuran evaluasi keberhasilan kapasitas peran sosial BUMDes, yaitu: pengetahuan tentang peran sosial, nilai yang melandasi peran sosial, dan upaya menjaga kepercayaan publik. Ketiga indikator ini dikembangkan dari konsep modal sosial. Merujuk pada konsep dasarnya, modal sosial mengandung makna adanya kemauan baik, simpati, nilai sosial, kerjasama dan kepercayaan (Fathy, 2019). Berdasarkan konsep modal sosial, maka kapasitas peran sosial BUMDes dapat dibangun dari aspek pengetahuan tentang peran sosial, nilai peran sosial, dan upaya menjaga kepercayaan publik.

Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan diharapkan BUMDes dapat mengembangkan peran kelembagaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Saat masyarakat desa sedang berada dalam situasi krisis kesehatan yang berdampak terhadap ekonomi, BUMDes hadir bersama dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu masyarakat. Dengan demikian, metode penyuluhan dan pendampingan terhadap BUMDes sangat relevan untuk dapat merevitalisasi kapasitas peran sosialnya dalam membantu persoalan-persoalan masyarakat seperti dampak ekonomi COVID-19

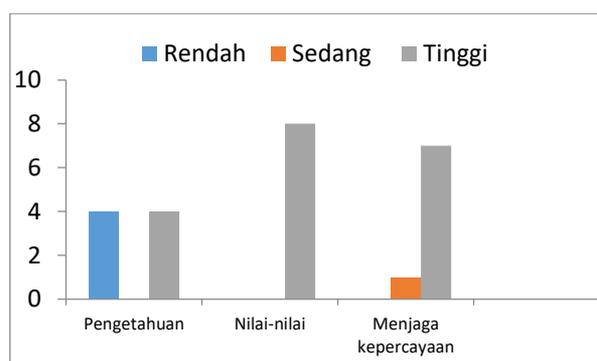
PEMBAHASAN

Penguatan Kapasitas Peran Sosial BUMDes

Langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melakukan sosialisasi terhadap pengurus BUMDes mengenai kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19. Sosialisasi ini merupakan hal yang penting agar pengelola BUMDes memiliki pengetahuan mengenai peran sosial mereka. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring kepada para pengurus BUMDes (Gambar 1). Tiga indikator penting yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan sosialisasi mengenai peran sosial yakni pengetahuan tentang peran sosial, nilai yang melandasi peran sosial, dan menjaga kepercayaan publik.



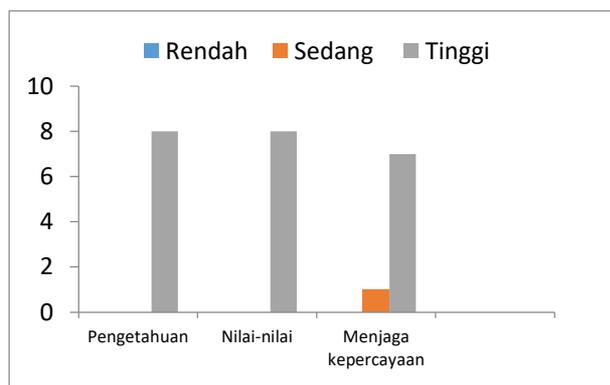
Gambar 1. Sosialisasi peran sosial BUMDes secara daring



Gambar 2. Hasil *pre-test* kapasitas peran sosial bumdes dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19

Sebelum dilakukan sosialisasi mengenai kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19, sebagian pengurus BUMDes memiliki tingkat pengetahuan yang cukup berimbang. Sebanyak 44% pengurus masih dalam tingkat pengetahuan yang rendah, sedangkan 56% sudah memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi. Selain itu, seluruh pengurus BUMDes dengan persentase 100% telah memiliki tingkat pemahaman yang cukup tinggi mengenai nilai-nilai utama dari BUMDes tersebut. Sebagian besar dari pengurus BUMDes sebesar 89% juga telah berhasil menjaga kepercayaan dari masyarakat, sedangkan sisanya 11% belum mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat (Gambar 2).

Hasil *post-test* menunjukkan tingkat pengetahuan pengurus BUMDes meningkat mencapai 100%. Tidak berbeda jauh dari data sebelumnya, terkait tingkat pemahaman pengurus mengenai nilai-nilai utama BUMDes masih tercatat dalam persentase sebanyak 100%. Selain itu, pengurus BUMDes sebesar 89% juga telah berhasil menjaga kepercayaan dari masyarakat, sedangkan sisanya 11% belum mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat (Gambar 3).



Gambar 3. Hasil *post-test* kapasitas peran sosial bumdes dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19

Melalui data pengujian hasil sosialisasi tentang kapasitas peran sosial BUMDes dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19, maka dapat disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Pengetahuan para pengurus BUMDes mengenai peran sosial berimbang. Ada sebagian pengurus yang belum memahami peran sosial BUMDes dalam penanganan dampak khususnya dampak ekonomi COVID-19. Sebagian lain memahami peran sosial yang harus dimainkan pengurus BUMDes dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat;
2. Nilai-nilai yang mendasari pelayanan kemasyarakatan yang terkait dengan penanganan dampak COVID-19 terhadap masyarakat adalah keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil sosialisasi kepada pengurus menunjukkan bahwa semua pengurus memahami nilai keberpihakan dan pemberdayaan sebagai landasan dalam menjalankan fungsi sosial BUMDes;
3. Upaya menjaga kepercayaan adalah bagian penting dari BUMDes dalam penanganan dampak COVID-19. Keberadaan BUMDes yang berkolaborasi dengan berbagai pihak harus menjaga kepercayaan publik, seperti mendistribusikan paket sembako dan alat pelindung diri kepada warga desa terdampak. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa hampir semua pengurus BUMDes memahami apa yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dalam penanganan berbagai bantuan kepada warga terdampak. Hasil lainnya adalah pemanfaatan potensi desa untuk pengadaan paket sembako. Dengan cara ini, maka BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat (Sari, 2017).

Pengujian secara statistik dengan menggunakan Uji T terhadap hasil *pre-test* dan *post-test* dari kegiatan sosialisasi mengenai peran sosial BUMDes menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p=0,033$). Artinya, sosialisasi memberikan kontribusi yang berarti terhadap peningkatan kapasitas peran sosial BUMDes dalam konteks penanggulangan dampak ekonomi COVID-19.

Pada masa pandemi COVID-19, kapasitas pengetahuan pengurus BUMDes untuk menangani dampak COVID-19 menjadi sangat penting, terutama dalam menjalankan peran sosialnya. Pengurus BUMDes idealnya memiliki pengetahuan mengenai *social distancing*, perilaku hidup bersih dan sehat, serta manajemen distribusi bantuan sosial. Melalui modal pengetahuan tersebut, pengurus BUMDes dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga diri dari potensi penularan virus. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi yang ditujukan untuk pengurus BUMDes tentang fungsi sosialnya dalam penanganan dampak COVID-19 sangat penting dan perlu dilakukan.

Fungsi sosial BUMDes sendiri telah disinggung dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Pada pasal 19 dijelaskan bahwa dua fungsi BUMDes yaitu fungsi ekonomi dan sosial. Dalam konteks pandemi COVID-19 yang memberikan dampak besar terhadap ekonomi masyarakat, BUMDes dapat memainkan peran bisnis sosialnya. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pelayanan distribusi bantuan sosial dan mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat desa (Gambar 4).



Gambar 4. Sosialisasi mengenai protokol kesehatan oleh pengurus BUMDes bersama Tim Pengabdian FISIP UNSOED

Pelaksanaan peran sosial BUMDes juga untuk menjawab belum optimalnya peran BUMDes menggerakkan perekonomian desa. Fungsi ekonomi yang melekat pada BUMDes belum memberikan kontribusi terhadap pengembangan potensi sosial

ekonomi desa. Faktanya, kapasitas pengelola tidak semuanya memadai. Demikian pula tidak semua kepala desa memberikan totalitas dukungan. Akibatnya, BUMDES mengalami stagnasi dalam menjalankan fungsi ekonominya.

Merespon dampak pandemi COVID-19, fungsi sosial BUMDes memiliki relevansi yang tinggi dengan upaya-upaya untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan penularan virus. Dalam hal ini, BUMDes dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelayanan kemasyarakatan. Melalui fungsi sosialnya, BUMDes dapat bergerak untuk ikut meringankan beban ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi sosial BUMDes tersebut menunjukkan peran kelembagaan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat desa. Pada saat masyarakat desa tengah berada di dalam situasi krisis kesehatan dan berdampak terhadap ekonomi, BUMDes hadir bersama dengan lembaga-lembaga lain untuk membantu masyarakat. Dengan demikian, ketika fungsi ekonomi masih dalam tahap rintisan, maka BUMDes dapat merevitalisasi peran sosialnya dalam membantu persoalan-persoalan masyarakat seperti dampak COVID-19.

Kolaborasi dan Pendampingan

Model kolaborasi lintas sektor (*cross-sector collaboration*) diterapkan dalam upaya penanggulangan dampak ekonomi COVID-19. Kolaborasi antara BUMDes dengan pemerintah desa terutama ditujukan untuk memberikan edukasi kepada warga terdampak terkait dengan *social distancing*, *physical distancing*, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Kolaborasi juga melibatkan BUMDES, pemerintah desa dan satgas gugus COVID-19 dua desa dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat desa.



Gambar 5. Distribusi paket sembako dan alat pelindung diri (masker) kepada warga desa

Hasil pendampingan terhadap pengurus dalam pengelolaan distribusi sembako, alat pelindung diri, dan sabun menunjukkan kapasitas

BUMDes yang cukup baik. Pengurus BUMDes mampu menerapkan protokol kesehatan pada saat pembagian paket bantuan sosial kepada masyarakat desa terdampak COVID-19. Metode pendampingan diperlukan oleh BUMDes agar kegiatannya dapat selaras dengan tujuan pemerintah desa. Namun demikian, model pendampingan selanjutnya dilakukan secara daring baik melalui *video call* maupun media sosial lainnya guna meminimalkan dampak pandemi COVID-19. Pentingnya pendampingan juga disampaikan oleh Fitrianto (2016) bahwa BUMDes membutuhkan pendampingan agar dapat mengembangkan kapasitas BUMDes dalam menjawab tantangan kompetisi dengan lembaga privat. Penerapan protokol jaga jarak dan penggunaan masker diantara para calon penerima paket bantuan sosial telah dilakukan oleh pengurus sebagai bentuk edukasi protokol kesehatan (Gambar 5). Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes memiliki kapasitas sebagai agen perubahan sosial yang penting dalam upaya mempromosikan protokol kesehatan.

Kafabih (2018) menyampaikan bahwa keberpihakan BUMDes terhadap kepentingan masyarakat merupakan konsekuensinya sebagai lembaga sosial. Dalam hal ini, BUMDes dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Dalam konteks kemitraan ekonomi, BUMDes terikat dengan nilai-nilai sosial seperti saling pengertian (*shared value*), kepercayaan (*trust*), dan budaya kerjasama (*a culture of cooperation*). Nilai-nilai modal sosial tersebut sangat penting untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kapasitas sosial merupakan komponen strategis untuk mendukung realisasi tujuan-tujuan pembangunan. Dalam konteks pandemi, kapasitas peran sosial dapat membantu pemerintah desa maupun *stakeholder* lainnya dalam menanggulangi COVID-19 (Merino & Carmenado, 2012).

Salah satu pendekatan untuk mengembangkan kapasitas peran sosial BUMDes adalah memberdayakan perannya dalam menanggulangi dampak COVID-19. Dalam studinya, Adnan dkk., (2017) menyoroti pemberdayaan sebagai strategi penguatan lembaga lokal. Sebagai paradigma pembangunan, pemberdayaan organisasi lokal, seperti BUMDes dapat meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dengan demikian, BUMDes dapat diandalkan sebagai mitra pemerintah desa dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini terlihat fungsi sosial BUMDES memiliki relevansi yang tinggi dengan upaya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat desa (Purnamasari, 2015; Rahmi dkk., 2020). BUMDeS mampu mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain di luar desa untuk menyelenggarakan pelayanan kemasyara-

katan. Dengan fungsi sosialnya, BUMDes dapat bergerak untuk berpartisipasi dalam penanganan dampak ekonomi COVID-19.

Partisipasi BUMDes di masa pandemi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, berperan sebagai agen perubahan sosial untuk mendorong perilaku masyarakat yang taat menjalankan protokol kesehatan. Kedua, menjalin kemitraan dengan pemerintah desa maupun lembaga lainnya dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Ketiga, memanfaatkan produk-produk yang tersedia di desa untuk paket bantuan sosial sehingga dapat menggerakkan ekonomi desa di masa pandemi.

KESIMPULAN

Keberadaan BUMDes dapat berperan sebagai lembaga sosial dalam membantu upaya-upaya penanganan dampak ekonomi COVID-19 kepada warga desa. Peran sosial ini perlu dioptimalkan agar BUMDes tidak hanya dilihat dari kegagalannya dalam menjalankan fungsi ekonomi komersial. Dalam konteks pandemi COVID-19, stakeholders dapat berkolaborasi dengan BUMDes untuk berperan dalam mengurangi dampak ekonomi COVID-19. Berbagai potensi yang ada di desa seperti beras dan telur dapat dioptimalkan dalam paket-paket bantuan sembako. Dengan cara semacam ini, potensi ekonomi desa dapat dioptimalkan sehingga dapat menggerakkan perekonomian desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana karena dukungan pendanaan dari Universitas Jenderal Soedirman. Oleh karena itu, tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada UNSOED yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian berbasis riset ini. Terima kasih juga ditujukan kepada Kepala Desa Cidora dan Besuki yang telah memfasilitasi tim pengabdian dengan BUMDes Cidora dan Besuki Kecamatan Lumbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Aiyub, & Bachri, N. (2017). The Reinforcement of Village Institutions and Role Integration of Stakeholders in Developing a Rural Creative Economy in Lhokseumawe City. *Expert Journal of Economics*, 5(1), 20-36. <http://economics.expertjournals.com/23597704-503/>.
- Atuna, R., & Harun, N. I. (2019). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Tantangan Pemerintah Sumalata Timur. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 2(2), 61-77. <http://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjpad/article/view/769>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran*

- Sosiologi*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Fitrianto, H. (2016). Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(2), 915-928. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp95658b964ffull.pdf>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020a). *Data Jumlah Kasus COVID-19*. <http://COVID19.bnpp.go.id>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020b). *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat*. <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/pedoman-penanganan-cepat-medis-dan-kesehatan-masyarakat-covid-19-di-indonesia/#.X2GsrxAzbcc>
- Ibrahim, Sutarna, I. T., Abdullah, I., Kamaluddin, & Mas'ad. (2019). Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat. *Sosiohumaniora*, 21(3), 349-354. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464>
- Kafabih, A. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan. *OECOMICUS Journal of Economics*, 3(1), 51-70. <https://doi.org/10.15642/oje.2018.3.1.51-70>
- Merino, S. S., & Carmenado, I. de los R. (2012). Capacity Building in Development Projects. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 46, 960-967. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.231>
- Purnamasari, D. (2015). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(10), 1655-1660. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1023>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 2(1), 90-102. <http://www.jurnal.stan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995>
- Rahmi, V. A., Ismanto, H. I., & Fathoni, M. Z. (2020). Pendekatan Bisnis Bumdes Berkemajuan di Kondisi Wabah Pandemi Covid'19. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 3(2), 90-98. <https://doi.org/10.30587/jre.v3i2.1730>
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189>
- Sari, Y. W. (2017). *Praktik sosial kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Guna di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*. <http://repository.unair.ac.id/68328/>
- Thomas, V. F. (2019). Kenapa ribuan bumdes mangkrak meski dana desa triliunan rupiah? <https://tirto.id/kenapa-ribuan-bumdes-mangkrak-meski-dana-desa-triliunan-rupiah-enpb>. Diakses 14 Mei 2020